



INDONESIA CPR UPDATE

CRISIS PREVENTION AND RECOVERY

BAHASA INDONESIA | JULI 2008



PROGRAM PEMBANGUNAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
mitra dalam pembangunan manusia

DAFTAR ISI

i Catatan redaksi.

Artikel

- 1 Tentang Pembangunan Melalui Perdamaian (Peace Through Development).
- 2 Memanfaatkan proses Musrenbang dalam mengarusutamakan pembangunan perdamaian.
- 4 Musrenbang di Desa Akelamo.
- 5 Jurnal sebagai Agen Perubahan di Maluku.
- 6 Festival "Kapata" di Kota Ambon.
- 7 Tentang Memperkuat Perdamaian dan Pembangunan yang Berkelanjutan di Aceh (Strengthening Sustainable Peace and Development in Aceh-SSPDA).
- 7 Proyek Makmur Gampung Kareuna Damai (MGKD).
- 8 Dukungan Mata Pencaharian UNDP Menjawab Tantangan Pembangunan Pasca-Konflik.
- 11 Profil Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Perdamaian.
- 12 Mengenai UNDP Indonesia.
- 12 Unit Pencegahan dan Pemulihan Krisis (Crisis Prevention and Recovery Unit-CPRU) UNDP Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai rincian kerja Tim Pencegahan Krisis dan Pemulihan UNDP Indonesia, mohon menghubungi kami di:

info.cpru.id@undp.org atau kunjungi situs kami **www.undp.or.id**

Foto Sampul:

Para perempuan berdiskusi dalam pertemuan desa di Ladang Baro, Aceh Selatan.

CATATAN REDAKSI

Diterbitkan pada bulan Februari 2008, isu pertama CPR Update Indonesia memberikan gambaran umum tentang portofolio kerja sama Pemerintah Indonesia, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan mitra utama lainnya dalam lingkup pencegahan dan pemulihan krisis. Edisi kedua CPR Update Indonesia merinci kerja sama UNDP dalam konteks pembangunan perdamaian serta rekonsiliasi dan reintegrasi pasca-konflik di berbagai wilayah Indonesia. Penciptaan lingkungan yang damai adalah prasyarat kunci untuk menciptakan kondisi dimana komunitas dapat menstabilkan diri setelah konflik dan pada akhirnya dapat menikmati berbagai manfaat prakarsa pembangunan yang lebih luas. Peran UNDP dalam mendukung para mitra utama untuk membantu komunitas semacam ini, mencakup berbagai bidang geografis dan tematis, dan publikasi ini bertujuan untuk menyoroti sebagian dari kegiatan ini.

Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam konteks pembangunan perdamaian. Memorandum Kesepakatan Helsinki 2005 berhasil menciptakan perdamaian di Aceh yang terkendala konflik selama lebih dari 30 tahun. Situasi serupa di Indonesia Timur yang bergejolak dan rentan konflik bahkan sampai akhir-akhir ini juga telah mereda secara signifikan. Namun tidak adanya konflik di daerah-daerah tersebut bukan berarti tuntasnya akar penyebab masalah. Sepenuhnya dipahami bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk memastikan bahwa pihak yang sebelumnya berkonflik mendapatkan bantuan secara holistik demi tercapainya solusi perdamaian jangka panjang.

Jalinan kerja sama UNDP yang erat dengan mitra di Indonesia sejauh ini telah membantu memberikan dan mendukung berbagai kegiatan pembangunan perdamaian yang efektif dan berjangka panjang. Program Pembangunan melalui Perdamaian (Peace Through Development-PTD) yang telah berlangsung selama 2 tahun telah menunjukkan hasil-hasil yang signifikan melalui dukungannya dalam proses perencanaan dari tingkat bawah dan telah mengukuhkan legitimasi proses ini sebagai ajang dialog untuk pengambilan keputusan bersama. Sementara itu, dukungan UNDP terhadap Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan mantan kombatan di Aceh telah membantu kemajuan proses pembangunan perdamaian yang rumit. Meskipun program UNDP berperan kecil dalam keseluruhan upaya Indonesia untuk secara efektif menangani dan menghapus berbagai penyebab konflik horizontal dan vertikal, UNDP menyadari pentingnya prakarsa-prakarsa semacam ini terhadap pembangunan nasional dan oleh karenanya tetap berkomitmen untuk mendukung pembangunan perdamaian selama jangka waktu yang diperlukan.

Tentunya, tidak satupun dari kegiatan-kegiatan diatas dapat terwujud tanpa dukungan finansial yang signifikan dari donor-donor kami. Sesungguhnya, kami sangat menyadari bahwa kegiatan kami diawasi oleh berbagai organisasi yang telah mendanai UNDP untuk mendukung program dalam bidang-bidang yang diulas dalam penerbitan ini. Menurut sifatnya, pembangunan perdamaian bukanlah upaya yang mudah dan pada saat yang bersamaan merupakan komponen yang penting dalam tugas organisasi yang bergerak dalam pembangunan Indonesia. Karena itu kami semua sangat berterima kasih pada para donor yang telah mendukung implementasi berbagai program yang dapat disimak lebih lanjut pada halaman-halaman berikut ini.

Kami ucapkan selamat membaca CPR Update edisi kedua ini.

Oliver Lacey-Hall

Kepala, Unit Pencegahan dan Pemulihan Krisis (CPRU)-UNDP Indonesia

PORTOFOLIO Proyek CPRU

Proyek	Periode	Mitra Nasional	Donor	Anggaran Total
Komunitas yang lebih Aman melalui Pengurangan Risiko Bencana (<i>Safer Communities through Disaster Risk Reduction SC-DRR</i>).	2007 – 2012	BAPPENAS, BNPB, Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah.	Departemen untuk Pembangunan Internasional (<i>Department for International Development-DFID</i>), Fasilitas Dukungan Desentralisasi (<i>Decentralization Support Facility-DSF</i>), DHL, AUSAID, UNESCAP.	USD 18,000,000
Bantuan Pemulihan Dini (<i>Early Recovery Assistance-ERA</i>) untuk Yogyakarta dan Jawa Tengah.	2006 – 2008	BAPPENAS.	Biro Pencegahan dan Pemulihan Krisis (<i>Bureau for Crisis Prevention and Recovery-BCPR</i>) UNDP, Dana Wali Amanat Tematis Pencegahan dan Pemulihan Krisis (<i>Crisis Prevention and Recovery Thematic Trust Fund-CPR TTF</i>), Agensi Pembangunan Internasional Swedia (<i>Swedish International Development Cooperation Agency-SIDA</i>), Trinidad dan Tobago, Strategi Internasional PBB untuk Pengurangan Bencana (<i>United Nations International Strategy for Disaster Reduction-UNISDR</i>).	USD 3,572,000
Perdamaian Melalui Pembangunan (<i>Peace Through Development-PTD</i>).	Kuartal terakhir 2005 - 2010	BAPPENAS.	Departemen untuk Pembangunan Internasional (<i>Department for International Development-DFID</i>), Belanda, New Zealand Aid, Agensi Pembangunan Internasional Swedia (<i>Swedish International Development Cooperation Agency-SIDA</i>).	USD 16,569,645
Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil	2006 – 2009	Agensi Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias.	Dana Multi Donor (<i>Multi Donor Fund</i>) untuk Aceh and Nias.	USD 5,996,500
Respon Darurat dan Pemulihan Peralihan (<i>Emergency Response and Transitional Recovery-ERTR</i>).	2005 - 2007	Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias.	AEDES, Armacell, Australia, Banamex, Belgia, Kanada, Coca Cola, CRF, Fasilitas Dukungan Desentralisasi (<i>Decentralization Support Facilities-DSF</i>), DHL, Jerman, Irlandia, Jepang, Korea Selatan, Dana Multi Donor untuk Aceh and Nias (<i>MDF</i>), Nepal, Belanda, Nike, Norwegia, Agensi Pembangunan Internasional Swedia (<i>Swedish International Development Cooperation Agency-SIDA</i>), Dana PBB untuk Kemitraan Internasional (<i>United Nations Funds for International Partnership-UNFIP</i>), Uni Emir Arab, Inggris, Kantor Koordinasi Bidang Hak Asasi Manusia (<i>Office for the Coordination of Humanitarian Affairs- OCHA</i>), Program Pangan Dunia (<i>World Food Programme-WFP</i>).	USD 125,296,298
Dukungan Teknis untuk Agensi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias.	2005 – 2009	Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias.	Dana Multi Donor (<i>Multi Donor Fund-MDF</i>) untuk Aceh dan Nias.	USD 19,978,092
Penguatan Perdamaian dan Pembangunan Berkelanjutan di Aceh (<i>Strengthening Sustainable Peace and Development in Aceh-SSPDA</i>).	2005 - 2008	BAPPENAS.	Departemen untuk Pembangunan Internasional (<i>Department for International Development-DFID</i>), Uni Eropa (<i>European Union-EU</i>), Fasilitas Dukungan Desentralisasi (<i>Decentralization Support Facilities-DSF</i>) dan Biro Pencegahan dan Pemulihan Krisis (<i>Bureau of Crisis Prevention and Recovery-BCPR</i>) UNDP.	USD 15,200,000
Program Transformasi Pemerintahan Aceh (<i>Aceh Governance Transformation Programme - AGTP</i>)	2008 - 2012	Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Aceh.	Dana Wali Amanat Multi Donor (<i>Multi Donor Trust Fund-MDTF</i>).	USD 13,976,259

MENGENAI PTD

(Pembangunan Melalui Perdamaian)

Transisi demokrasi Indonesia dan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah seringkali memicu konflik dengan kekerasan di sebagian daerah di Indonesia. Tiga provinsi, Maluku, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara telah mengalami konflik golongan sejak 1999 dengan akibat penurunan peringkat Indonesia dalam pembangunan manusia dan kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals - MDGs).

Pemerintah Indonesia telah merespons kebutuhan pembangunan daerah yang mengalami konflik dengan tujuan mengurangi potensi kekerasan serupa di masa depan. Kaitan antara perdamaian dan pembangunan disoroti dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Pemerintah (2004-2009) yang menargetkan "sebuah masyarakat, negara dan bangsa yang aman, bersatu, harmonis dan damai." Bekerja sama dengan BAPPENAS, UNDP mendukung strategi ini melalui Program Pembangunan Melalui Perdamaianya (Peace Through Development Programme-PTD) di daerah-daerah tertentu di Indonesia yang baru saja pulih dari konflik komunal. PTD adalah program lima tahun BAPPENAS dan UNDP yang bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat sipil merumuskan dan mengimplementasikan

kebijakan dan program pembangunan yang peka konflik. PTD bertujuan mendorong pengenalan perencanaan peka konflik dalam proses pembangunan partisipatif dengan fokus pada pembangunan kemitraan pembangunan jangka panjang, dukungan bagi tata laksana pemerintahan yang memadai dan prakarsa mata pencaharian pembangunan perdamaian bagi masyarakat sipil. Melihat



Proses fasilitasi komunitas dalam pra-Musrenbang di Palu.

pembelajaran yang dapat diambil dari Program Pemulihan Maluku dan Maluku Utara UNDP, Program Pembangunan Perdamaian Kepulauan Kei dan proyek bantuan persiapan ke arah Pembangunan Perdamaian, Rekonsiliasi dan Pemulihan di Sulawesi Tengah, PTD juga membangun berdasarkan analisis serangkaian penilaian tematis dan studi penelitian seperti Analisis

Perdamaian dan Pembangunan (*Peace and Development Analysis-PDA*) yang dilakukan UNDP tahun 2005 di lima provinsi di Indonesia.

Diimplementasikan sejak kuartal terakhir 2005 di provinsi Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, PTD saat ini diuji coba di enam kabupaten sasaran, 12 kecamatan dan 24 desa. Sebagai hasil implementasinya, hampir semua desa, kecamatan dan kabupaten yang disasar PTD bisa ikut serta di putaran Musrenbang 2006/2007 yang dilaksanakan melalui berbagai diskusi grup fokus. Setelah melewati sebuah putaran Musrenbang, peserta mempunyai pemahaman lebih baik dan komitmen lebih kuat mengenai peran mereka dalam proses Musrenbang. Di sisi lain, masyarakat sipil dan pejabat pemerintah daerah memetik manfaat dari prakarsa PTD di banyak daerah sasaran dan sebuah program meningkatkan keterlibatan DPRD dalam PTD telah dimulai.

Situs PTD, saat ini hanya dalam Bahasa Indonesia, adalah www.ptd-id.org. Seperti publikasi internal UNDP, situs ini menyoroti kegiatan PTD yang didanai Pemerintah Belanda, Pemerintah Inggris (DFID), dan Pemerintah Selandia Baru (NZAID) untuk bidang pembangunan perdamaian.

Kontribusi Pemerintah Belanda terhadap PTD

Pemerintah Belanda secara konsisten menyalurkan bantuan dana yang berarti kepada PTD melalui berbagai mekanisme multilateral selama bertahun-tahun.

Berkat pendanaan tersebut, para anggota 63 organisasi mengikuti pelatihan tingkat kelembagaan, yang meliputi berbagai subyek seperti perumusan PERDA, pengumpulan data dan manajemen basis data. Beberapa peserta berhasil menjadi fasilitator pelatihan yang

memadai dan berperan penting dalam menyampaikan pengetahuan yang telah diserap kepada peserta pelatihan lainnya. Bahkan, pelatihan dan keahlian dua anggota kelompok perempuan (FP3) telah diakui secara internasional dan mereka diundang menghadiri pertemuan-pertemuan berkaitan dengan Gender dan Pembangunan Perdamaian di London dan Bangkok.

“Saya senang PTD menilai pentingnya Fasilitator Musrenbang Desa, bukan hanya untuk menjamin diskusi berjalan sesuai jalur tetapi juga membantu mengarusutamakan kepekaan terhadap konflik di dalam proses keseluruhan. Kenyataan bahwa para fasilitator dipilih dari masing-masing desa menjamin keterwakilan yang tepat dan keberlanjutan mekanisme ini.”

Abdollah Umasangaji
pejabat Kabupaten Halmahera Barat.

Tujuan PTD

PTD bertujuan memperkuat kapasitas tata laksana pemerintahan dalam perencanaan peka konflik untuk mendukung pencegahan konflik jangka panjang dan memperbaiki mata pencaharian di daerah yang mengalami konflik melalui berbagai proyek yang memperkuat kerja sama sosial.

Mengintegrasikan pencegahan konflik ke dalam proses perencanaan daerah.

PTD memainkan peranan kunci dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian ke dalam proses perencanaan daerah (Musrenbang). PTD juga bertujuan memfasilitasi partisipasi komunitas yang mengalami konflik dalam proses Musrenbang dan mendorong partisipasi lebih luas kelompok yang termarginalisasi seperti perempuan dan kalangan muda. Demi meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integrasi pencegahan konflik ke dalam Musrenbang, PTD telah melatih 273 pejabat pemerintah daerah (67 diantaranya perempuan) dalam perencanaan peka konflik. Untuk lebih lanjut mendorong perencanaan peka konflik di kabupaten sasaran, sejak dimulai, PTD telah memberikan 65 dana hibah ke organisasi masyarakat sipil (OMS) dan pemerintah daerah untuk implementasi kegiatan semacam ini. Program PTD juga membantu pemerintah daerah mengembangkan program penjangkauan masyarakat sipil untuk Musrenbang, menyediakan informasi lebih sistematis bagi masyarakat tentang

aturan, proses serta umpan balik terhadap hasil-hasilnya.

Memperbaiki mata pencaharian di daerah konflik.

Program PTD juga bertujuan memperbaiki mata pencaharian di komunitas yang mengalami konflik melalui proyek-proyek yang secara bersamaan bertujuan membangun perdamaian dan kohesi sosial. Kegiatan pengelolaan sampah PTD telah memulihkan ikatan komunitas yang sebelumnya tercerai-berai karena konflik dimana anggota masing-masing komunitas bahkan tidak menyapa satu sama lain. Sekarang, anggota kedua komunitas bekerja bahu-membahu di pusat pengolahan sampah kota. Meskipun pemulihan ekonomi belum maksimal, dasar pembangunan yang berkeadilan ini diyakini merupakan suatu faktor pencegah konflik. Sejak awal, PTD telah memberikan hibah kepada 60 OMS dengan total lebih dari 2 juta dollar AS.

Memperkuat peran perempuan dalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian.

Perempuan secara tidak proporsional terkena akibat konflik. Mereka juga memainkan peranan penting, bahkan menentukan, dalam pembangunan perdamaian meskipun sering kali dikesampingkan dari proses resmi. Program PTD bertujuan memperkuat peranan perempuan dalam pembangunan perdamaian dan pencegahan konflik melalui berbagai kegiatan yang ditujukan untuk

mempromosikan hak asasi perempuan dan meningkatkan kesadaran jender, memfasilitasi partisipasi perempuan dalam proses perdamaian formal, membangun kapasitas aktivis perdamaian perempuan dan organisasi perempuan, memberdayakan perempuan dari segi ekonomi di daerah yang mengalami konflik, menangani kekerasan rumah tangga dan seksual yang berbasis jender dan membuat data jender untuk memantau dampak program dari segi jender.

PTD juga mempromosikan partisipasi aktif perempuan dalam proses perencanaan daerah seperti Musrenbang dengan memberikan akses informasi mengenai proses perencanaan di wilayah mereka dan memperkuat ketrampilan kepemimpinan dan penyelesaian masalah mereka. Hasilnya, 1.031 perempuan berpartisipasi dalam proses Musrenbang di daerah yang didukung PTD, meningkatkan partisipasi perempuan sebesar 20% sejak dimulainya program. Dukungan juga diberikan kepada OMS perempuan seperti Forum Pemberdayaan dan Perjuangan Perempuan yang telah melancarkan lobi untuk mempengaruhi peraturan daerah tentang kekerasan rumah tangga terhadap perempuan. Di Maluku Utara, sebuah rancangan peraturan telah dibuat dan tidak lama lagi disahkan DPRD dan pada saat yang sama program itu juga mendukung penelitian tentang perempuan dalam pembangunan perdamaian bekerja sama dengan Pusat Studi Perempuan di Universitas Maluku dan Maluku Utara.

MEMANFAATKAN

proses Musrenbang dalam mengarusutamakan pembangunan perdamaian

Apa itu Musrenbang?

Musrenbang adalah singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau proses konsultasi perencanaan partisipatif daerah dari tingkat bawah yang diadakan secara tahunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Mendasari proses Musrenbang adalah itikad untuk mendefinisikan dan memasukkan berbagai kebutuhan perencanaan daerah dan akar rumput sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembangunan tahunan pada tiap tingkat pemerintahan.

Meski proses Musrenbang merupakan kewajiban pemerintah (menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), kebijakan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan sebelum program PTD dilaksanakan. Dalam tahap awal program PTD, informasi *baseline* dicatat sebagai acuan untuk mengukur dampak PTD terhadap proses perencanaan pembangunan partisipatif. PTD menemukan fakta bahwa sebagian besar desa di daerah binaan di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah belum pernah

melaksanakan kegiatan Musrenbang.

Praktik yang biasanya dijalani di tingkat desa sebelum dicetuskannya PTD adalah mengizinkan Kepala Desa memutuskan secara sepihak berbagai usulan kegiatan pembangunan tanpa melalui proses konsultasi dengan warga desa. Oleh karena itu, dalam masa pra-PTD, sangat besar kemungkinan tidak banyak usulan pembangunan tingkat desa yang akurat mencerminkan kebutuhan warga. Pada kenyataannya banyak suara yang tidak terdengar.

Ada dua alasan mengapa pemerintah daerah menghindari pelaksanaan proses Musrenbang di tingkat desa. Pertama, banyak pejabat menganggap penyelenggaraan Musrenbang di tingkat desa menghabiskan biaya yang tidak sedikit dan kedua, pejabat sering meragukan warga desa terpencil mampu melaksanakan proses tersebut dengan baik. Sebelum intervensi PTD tahun 2005, Musrenbang tingkat desa pada umumnya dilaksanakan hanya sebagai formalitas tanpa partisipasi masyarakat setempat. Mengingat sasaran PTD adalah: "penguatan kapasitas tata laksana pemerintahan dalam perencanaan yang peka konflik untuk mendukung pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian jangka panjang," program pada dasarnya mengandalkan proses Musrenbang. Dengan kekurangan tiadaan Musrenbang di tingkat desa, kegiatan PTD sejak awal diantisipasi sebagai tugas berat.

Mengapa mengintervensi Musrenbang?

PTD menganggap proses Musrenbang penting bagi upaya pengarusutamaan pembangunan perdamaian di daerah yang rentan konflik. Melalui Musrenbang, komunitas yang terlibat konflik dapat menyampaikan kekhawatiran dan kebutuhan kepada pejabat daerah (baik legislatif maupun eksekutif) yang memungkinkan partisipasi masyarakat di daerah dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi dan konsultasi yang lebih luas penting untuk meminimalisasi ketidakpuasan yang mungkin terjadi terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Alasan lain bagi PTD untuk melakukan intervensi melalui proses Musrenbang adalah untuk menjamin keberlanjutan keluarannya melalui advokasi dengan berbagai instansi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang peka konflik jauh setelah program PTD diselesaikan. Untuk itu, "Musrenbang Plus" yang

memasukkan pembangunan perdamaian dan prinsip-prinsip peka konflik 'do no harm' (jangan menimbulkan bahaya), semakin diakui sebagai sebuah komponen bernilai tambah dari berbagai upaya PTD mengarusutamakan penggalangan perdamaian dalam pembangunan.

Apa yang telah dilakukan PTD dengan proses Musrenbang?

Dari situasi pada awal program PTD September 2005 dimana tidak terdapat Musrenbang di tingkat desa di daerah binaan, PTD telah memfokuskan berbagai upaya advokasi untuk meyakinkan pemerintah daerah tentang manfaat peningkatan kredibilitas dan dukungan



Talkshow radio interaktif di sebuah radio di Maluku Utara membahas pembangunan perdamaian, masalah jender, dan peran masyarakat sipil.

sebagai dampak dilakukannya perencanaan pembangunan partisipatif di semua tingkat. PTD juga memberikan dukungan untuk mengimplementasikan Musrenbang tingkat desa tanpa menghabiskan anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, kendala lokasi desa terpencil dan persepsi pemerintah daerah tentang kesiapan atau kapasitas warga desa untuk terlibat dalam proses tersebut lambat laun sirna ketika program PTD mulai membuahkan hasil.

Pada tahap awal, bekerja sama dengan BAPPEDA, PTD menyelenggarakan serangkaian lokakarya multi-pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan meredakan kekhawatiran seputar proses Musrenbang. Lokakarya tersebut juga

mengidentifikasi berbagai intervensi untuk menyelesaikan masalah di tiap daerah binaan. Lokakarya ini menjadi dasar pembuatan Pedoman Teknis Musrenbang yang memasukkan konsep peka konflik, termasuk prinsip-prinsip utama tata laksana pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi yang melibatkan semua pihak, transparan dan terakuntabilitas. Untuk mendukung pengembangan kapasitas pemerintah daerah lebih lanjut, PTD kemudian memulai dan terus-menerus memberikan pelatihan dan dukungan teknis bagi para pejabat daerah (baik eksekutif maupun legislatif) untuk mengimplementasikan perencanaan yang peka konflik. Untuk memastikan proses Musrenbang terus berlangsung lancar, fasilitator-fasilitator Musrenbang PTD dipilih, dilatih dan diberdayakan untuk mendukung proses perencanaan yang partisipatif, transparan dan terakuntabilitas di seluruh daerah binaan. Para fasilitator PTD juga memastikan bahwa semua usulan kegiatan pembangunan akan menjawab isu-isu pembangunan perdamaian dan kohesi sosial yang merupakan komponen-komponen perencanaan yang penting di berbagai daerah pasca konflik di Indonesia.

Sejak tahun 2005, PTD telah mendanai serangkaian kegiatan yang meliputi sesi-sesi pelatihan bagi masyarakat madani dan para pejabat pemerintah daerah tentang proses tata laksana pemerintahan yang memadai dalam konteks perencanaan partisipatif. Pelatihan mencakup tiga lokakarya dua hari untuk 20 orang masing-masing dari tiga provinsi yang disasar di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi mengenai pengembangan model Musrenbang yang ideal, diikuti dengan sebuah pertemuan nasional sehari untuk finalisasi proses Musrenbang yang ideal tersebut. Untuk mendorong keterlibatan dalam proses perencanaan tersebut, PTD juga mendanai pertemuan-pertemuan

Intervensi PTD yang berhasil

Muhajir Albaar, Sekretaris Provinsi Maluku Utara, memuji kemajuan PTD dan yakin bahwa proyek tersebut tepat sasaran, seperti dikutip di *Ternate Pos* edisi 21 April 2008: "Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PTD dalam peranannya di Forum SKPD Provinsi dimana staf PTD berkontribusi dalam mengubah mekanisme acara tersebut. Tidak seperti

tahun-tahun sebelumnya ketika forum PTD dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel, tahun ini sistemnya telah diubah agar setiap SKPD memiliki bilik sendiri. Ini tentunya akan membantu proses integrasi antara kebijakan dari atas dan perencanaan dari bawah".

Sebuah catatan penting di Maluku Utara adalah dampak intervensi Musrenbang PTD

pada DPRD Kabupaten Halmahera Barat. Setelah pelatihan yang diberikan untuk para anggota DPRD, terdapat permintaan dalam jumlah besar agar PTD membuat sebuah rencana pelatihan perencanaan pembangunan peka konflik. Dana untuk tujuan ini telah diusulkan dari anggaran DPRD.

simulasi Musrenbang di ketiga provinsi yang disasar di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. "Sistem gladi" pra-Musrenbang ini menjamin semua peserta menyiapkan diri dengan baik untuk mengikuti acara dan berpartisipasi dalam proses tersebut.

PTD di Maluku Utara

Di Maluku Utara, PTD telah memfasilitasi sejumlah perbaikan proses Musrenbang di tingkat kabupaten dan provinsi. Untuk pertama kalinya, pemprov Maluku

Utara bersedia mengumumkan plafon anggaran yang tersedia untuk setiap sektor pembangunan. Di masa lalu, informasi ini tidak transparan. Berbagai respon positif termasuk sebuah permintaan formal dari Kepala BAPPEDA Maluku Utara agar PTD memberikan pelayanannya diluar daerah-daerah binaan resmi PTD.

PTD juga berhasil mengadvokasikan berbagai perubahan terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, yakni dari "metode pleno" ke sebuah "metode tatap

muka" yang diyakini bisa lebih mudah diakses dan responsif bagi keinginan-keinginan daerah. Melalui pendekatan baru ini, setiap instansi teknis provinsi, yang dikenal dengan Dinas/SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), menyediakan meja/bilik dimana para wakil tingkat kabupaten dapat berinteraksi langsung serta berdiskusi dan menyampaikan respons terhadap penerimaan/penolakan berbagai kegiatan pembangunan yang diusulkan.

Apa berikutnya?

- Menjamin kemajuan yang dicapai melalui PTD dalam proses Musrenbang tidak akan berhenti setelah berakhirnya program PTD.
- Membangun di atas kesiapan para pemangku kepentingan untuk melanjutkan proses perencanaan pembangunan partisipatif yang peka konflik setelah PTD berakhir. Pertimbangan-pertimbangan penting termasuk penilaian mengenai kapasitas para warga desa melaksanakan "Musrenbang Plus" dengan baik, yang meliputi pembangunan perdamaian dan prinsip peka konflik (jangan menimbulkan bahaya), yang telah meningkat. Pada saat yang sama, tolak ukur kemajuan PTD termasuk jumlah usulan yang disetujui pemerintah dan apakah anggaran APBD mengakomodasi usulan pembangunan tingkat desa.
- Menyelesaikan evaluasi paruh waktu PTD pada kuartal ketiga 2008. Sebagai suatu penilaian strategis terhadap arah utama, relevansi dan keefektifan program UNDP, evaluasi paruh waktu tersebut akan melibatkan pemangku kepentingan utama menilai berbagai pencapaian dan mendefinisikan berbagai respons terhadap segala perubahan signifikan dalam konteks pembangunan yang membutuhkan penyesuaian strategis.
- Setelah evaluasi paruh waktunya, PTD diharapkan menyempurnakan dan meningkatkan kegiatannya sesuai rekomendasi para pemangku kepentingan utama.

KISAH

Musrenbang di Desa Akelamo

Pertengahan Januari 2007 di Desa Akelamo, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara biasanya diguyur hujan. Namun, ada peristiwa yang tidak biasa yang terjadi di sebuah Sabtu pagi yang cerah awal tahun itu. Anak-anak tidak masuk sekolah, melainkan bermain-main di halaman belakang meskipun Sabtu hari sekolah. Beberapa pria berjalan-jalan di sepanjang jalan desa memanggul kursi dan beberapa perempuan berkunjung dari rumah ke rumah, mengingatkan para penghuni bergabung di sekolah dasar satu-satunya di Akelamo itu.

Sementara itu, kegiatan lain berlangsung di sekolah desa tersebut, dimana kursi-kursi diatur dan ditata; antisipasi memenuhi ruangan seiring dikeluarkannya *flipchart* dan spidol dari kotak. Ismail Alam, Sekretaris Desa Akelamo menyambut ramah setiap warga yang datang dan jelas hari itu istimewa bagi mereka. Untuk pertama kalinya, warga Akelamo mengadakan Musrenbang Desa dan karena gedung sekolah yang digunakan

sebagai tempat berkumpul warga, anak-anak pun bergembira karena mereka diliburkan.

Dari 96 wakil yang menghadiri Musrenbang tersebut, 43 di antaranya perempuan. Sebelumnya, berbagai diskusi grup fokus telah diadakan di tingkat dusun oleh berbagai kelompok perempuan, pemuda dan petani dan kini para peserta dengan antusias berdiskusi dengan wakil-wakil desa lainnya tentang usulan-usulan pendanaan PTD di tingkat desa.

Ekspresi dan suasana di dalam ruang kelas itu sangat bersemangat. Nurni Tomagola, ibu dua anak mengomentari: "Saya senang perempuan diundang ke pertemuan ini. Kami berharap bisa menyumbangkan gagasan dari perspektif perempuan. Saya akan membawa hasil diskusi kelompok kami ke pertemuan ini dan mudah-mudahan kebutuhan perempuan dapat terakomodasi di dalam usulan desa."

Musrenbang tersebut juga dihadiri

pejabat pemerintah daerah dari tingkat kabupaten dan kecamatan yang bertugas mensosialisasikan kebijakan pemerintah pada tahun berikutnya. Ini harus dipertimbangan dalam diskusi Musrenbang Desa dan merupakan bagian dari mekanisme perencanaan dari atas. Berhubung desa Akelamo salah adalah satu dari komunitas yang dilanda konflik di Halmahera Barat, Musrenbang memberikan para pejabat



Menentukan prioritas adalah tantangan tersulit dalam Musrenbang Desa.

daerah peluang yang sangat baik langsung mendengarkan masukan-masukan warga tentang hal-hal penting bagi kehidupan mereka.

Bahrum Jae, Fasilitator Musrenbang Desa, memoderasi sebuah diskusi dinamis yang diikuti 96 peserta. Dia mulai dengan menyilakan warga membahas berbagai isu dan masalah desa terkini dengan tujuan mendefinisikan dan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, para warga bermusyawarah secara bebas karena mereka menyadari pentingnya berbagai kegiatan yang diusulkan dan, meskipun perdebatan sering kali sengit, tidak ada yang tersinggung ketika ada gagasan yang ditolak sebagian besar warga bila dianggap tidak terlampaui penting. Sebagai contoh, dari proses musyawarah disimpulkan bahwa pembangunan gapura sekolah tidak penting jika dibandingkan dengan pembangunan mekanisme pencegahan banjir atau balai desa. Menurut Bahrum bagian tersulit dalam memfasilitasi diskusi semacam ini adalah mencapai kesepakatan tentang prioritas berbagai aksi untuk masa mendatang.

Abdollah Umasangaji, seorang Pejabat Kabupaten Halmahera Barat, yang sebelumnya Manajer Program PTD di Halmahera Barat, memuji dampak PTD dengan mengatakan: PTD melakukan sesuatu yang tepat dengan melibatkan wakil setiap desa. Abdollah senang dengan keluaran Musrenbang yang sangat responsif terhadap berbagai isu yang berkaitan

dengan kepekaan konflik di seluruh daerah tersebut.

Pada akhir dari Musrenbang Desa yang semarak tersebut, warga Akelamo memutuskan mengusulkan tiga prioritas utama yang dibawa ke tahap proses perencanaan Musrenbang berikutnya di tingkat kecamatan.

Prioritas utama desa Akelamo adalah usulan pembangunan Balai Desa. Para warga sependapat sebuah tempat umum untuk bertemu dan berbau akan memperkuat kohesi sosial, terutama karena pengalaman tinggal di daerah konflik. Prioritas kedua, prakarsa menghidupkan kembali budaya lokal dan hukum adat sebagai sarana menyatukan masyarakat di tengah perbedaan yang beragam. Prioritas ketiga pembangunan sistem drainase untuk mencegah kerusakan akibat banjir saat musim hujan. Semua aktivitas yang disepakati ini didokumentasikan dalam Berita Acara Musrenbang Desa untuk musyawarah dan tindak lanjut berikutnya.

Lebih dari satu tahun telah lewat sejak desa Akelamo mengadakan Musrenbang yang pertama dan situasi berubah secara signifikan. Berkat hibah dari PTD dan sumbangan bahan bangunan dan tenaga dari warga, Balai Desa Akelamo sekarang berfungsi dan menjadi tempat populer yang melayani semua bentuk kegiatan desa.

Dengan gotong-royong mendirikan bangunan para warga menemukan cara

yang efektif memperkuat kohesi sosial. Berkolaborasi dengan organisasi masyarakat madani desa, PTD juga menyumbangkan hibah tambahan untuk membantu implementasi aktivitas kedua yang diusulkan Musrenbang: upaya menanamkan pemahaman tentang budaya daerah yang lebih baik untuk anak-anak usia sekolah. Sementara itu, APBD telah mengakomodasi prioritas Musrenbang yang ketiga dan mendanai pembangunan sistem drainase yang telah berfungsi. Adnan Samsuddin, Kepala sebuah Komunitas Lingkungan di desa Akelamo mengatakan: "Pada awalnya saya skeptis tentang Musrenbang. Saya pikir itu hanya buang waktu karena usulan kami tidak akan pernah terwujud." Akhirnya, sementara semua berjalan lancar dengan sistem drainase, balai desa dan pengajaran budaya daerah di sekolah di desa Akelamo, anak-anak merasa kurang puas-tidak ada liburan lagi karena Musrenbang.

“Saya akui proses ini telah berjalan lancar. Balai Desa yang merupakan impian kami sekarang terwujud dan kami mempunyai tempat berkumpul dan mendiskusikan berbagai persoalan tanpa harus meliburkan anak-anak sekolah.”

Adnan Samsudin
Kepala sebuah Komunitas Lingkungan
di desa Akelamo.

PARA JURNALIS

Sebagai Agen Perdamaian di Maluku

"Proses Musrenbang merupakan salah satu saluran bagi komunitas untuk menyampaikan aspirasi pembangunan. Namun, berbagai aspirasi masyarakat yang keliru bisa menjadi sumber konflik," kata Azis Tunny, Koordinator Pusat Media Maluku (MMC). Demikian sambutannya kepada 30 jurnalis dan para kepala kantor berita daerah yang menghadiri lokakarya berjudul: "Meningkatkan Kapasitas Jurnalis untuk Mendukung Publikasi Hasil Musrenbang dan Peliputan Pilkada Maluku Melalui Perspektif Jurnalis Perdamaian" yang diadakan akhir Mei 2008. Diselenggarakan oleh Pusat Media Maluku bekerja sama dengan

Unit Manajemen Program PTD Maluku, menurut Azis, acara ini akan mendukung media memainkan peranan menjembatani berbagai aspirasi komunitas dengan pembuat kebijakan. Sejumlah prakarsa telah dibuat untuk memberdayakan jurnalis dalam memainkan peranan tersebut.

Sebagai contoh, satu acara bincang-bincang radio interaktif di Ternate, Maluku Utara, menggambarkan pertukaran informasi antara pejabat pemerintah provinsi dan komunitas mendiskusikan berbagai isu dan solusi untuk memelihara perdamaian di provinsi mereka. Melalui



acara *talk show* radio interaktif, sebagian komunitas memahami lebih baik prinsip-prinsip pluralisme. Selama siaran interaktif ini, berbagai diskusi konstruktif meliputi kenangan di masa-masa sulit selama konflik, berbagai masalah yang dialami komunitas setelah konflik serta berbagai saran praktis dari penelepon untuk membantu membangun dan menjaga perdamaian di masing-masing komunitas.

Liputan media tentang berbagai isu peka konflik bisa berdampak guna atau sebaliknya, tidak produktif, terhadap upaya rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian. Adopsi wawasan peka konflik dalam jurnalisme, terutama di dalam masyarakat pasca konflik dan daerah rentan konflik, bisa mendinginkan reaksi negatif masyarakat yang kadang terpicu oleh ajaran jurnalistik klasik yang menyatakan bahwa "berita yang bagus adalah berita buruk."

Sederhananya, jurnalisme peka konflik, bertujuan menunjukkan faktanya bahwa "berita baik adalah berita baik" dan pelaporan berita terbaru berperan penting untuk mengurangi potensi konflik. Dalam lokakarya tersebut, jurnalis diberikan pemahaman lebih luas tentang posisi strategis mereka yang dapat memanas-manasi atau menyejukkan konflik. Para

peserta diminta obyektif dan netral dalam peliputan berbagai kejadian kontroversial dengan mempertimbangkan kepekaan terhadap potensi konflik dalam menulis berita dan artikel, khususnya yang berkaitan dengan daerah-daerah pasca konflik seperti Maluku.

Lokakarya tersebut juga meningkatkan kemampuan kapasitas para peserta mempublikasikan proses dan hasil diskusi Musrenbang. Para peserta lokakarya tiga hari tersebut kembali ke media masing-masing dengan komitmen teguh menyiarkan liputan proses Musrenbang secara positif, partisipatif dan peka konflik. Pengetahuan yang diperoleh para jurnalis selama lokakarya mencakup pemahaman yang lebih luas tentang peran pers memuat isu-isu pembangunan dan yang berkaitan dengan konflik serta pemahaman lebih luas tentang akibat-akibat penggunaan kata-kata yang provokatif dalam media. Sejak lokakarya tersebut, pemantauan terhadap pers menunjukkan peningkatan tajam pemuatan berita yang peka konflik di Maluku.

Selain itu, berkolaborasi dengan unit manajemen program PTD Maluku, Forum Jurnalis Perempuan Maluku (FJPM) menyelenggarakan pelatihan untuk 40 jurnalis perempuan meningkatkan

kemampuan dalam penulisan dan peliputan berita yang peka terhadap konflik dan jender. Menurut May Rahail, ketua forum tersebut, keputusan pemilihan subyek-subyek ini sebagai fokus pelatihan didasarkan pada berbagai pengamatan bahwa media tidak meliput keterlibatan perempuan pada dua isu tersebut secara proporsional. "Ada banyak subyek yang menjadi perhatian utama perempuan, contohnya kekerasan rumah tangga yang tidak mendapat perhatian memadai dari media," ujar May. Oleh karena itu, pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan jurnalis perempuan menulis artikel berita mengenai perempuan dalam masyarakat dan pada saat yang sama, mendidik masyarakat tentang isu-isu yang mempengaruhi perempuan di daerah pasca konflik seperti partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, perempuan sebagai pemimpin, kekerasan rumah tangga dan pelecehan seksual.

Berhubung jurnalisme perdamaian dianggap sebagai sebuah kekuatan yang besar untuk membangun kembali hubungan dan kepercayaan di antara lembaga-lembaga pemerintah, orang-orang penting, komunitas-komunitas dan masyarakat, kemampuan para jurnalis Maluku untuk menjadi agen perdamaian telah ditingkatkan secara signifikan oleh prakarsa-prakarsa ini.

"FESTIVAL KAPATA" Budaya T tutur di Kota Ambon

Festival "Kapata", diterjemahkan sebagai 'dongeng tradisional', adalah sebuah acara budaya yang paling unik di Maluku. Sarat dengan advokasi untuk kesatuan dan kohesi masyarakat, "Kapata" oleh karenanya ditujukan untuk mengingatkan semua kelompok usia tentang nilai-nilai itikad baik dan ikatan keluarga yang kuat. Terakhir kali diadakan Desember 2007 dan didukung PTD sebagai sebuah kegiatan pembangunan perdamaian, "Kapata" mengukuhkan Perayaan Hari Perdamaian Sedunia yang diadakan September sebelumnya.

Dikenal sebagai "Kapata" di Maluku Tengah dan "Ciarka" di Maluku Barat, cerita-cerita tradisional yang dinarasikan selama festival umumnya sarat dengan isu-isu sosial. Untuk membuat konteks historis dan tradisinya

cerita bisa disesuaikan seperlunya untuk menanggapi isu-isu terkini.

Oleh karena itu, selama narasi cerita rakyat "Kapata" pada Desember 2007, para penonton diingatkan tentang nilai-nilai masyarakat di awal sejarah Maluku yang dikenal dengan *pela gandong*. Dengan menggunakan para pemimpin masyarakat dan tetua serta kelompok-kelompok perempuan dan pemuda sebagai penyampai pesan perdamaian, "Kapata" oleh karenanya menanggapi revitalisasi nilai-nilai budaya dan tradisional di Maluku untuk mempengaruhi masyarakat propinsi tersebut secara positif. Pesan-pesan kunci pembangunan perdamaian tentang rasa saling menghormati, toleransi, kepedulian terhadap tanah dan masyarakatnya untuk mencapai rekonsiliasi dan menciptakan



perdamaian dengan itu disampaikan melalui cara baru yang memanfaatkan mekanisme historis.

TENTANG SSPDA

(Memperkuat Perdamaian dan Pembangunan yang Berkelanjutan di Aceh)

Program Memperkuat Perdamaian dan Pembangunan Berkelanjutan di Aceh (*Strengthening Sustainable Peace and Development in Aceh-SSPDA*) bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia memperkuat proses perdamaian Aceh untuk mengimplementasikan Memorandum Kesepahaman Helsinki dan meningkatkan pembangunan, keadilan dan perdamaian berkelanjutan di propinsi tersebut.

SSPDA diimplementasikan melalui kerja sama erat dengan BAPPENAS, Kantor Gubernur Aceh, Badan Pelaksana Reintegrasi Aceh (BAPEL - BRA) dan pemerintah daerah untuk membantu komunitas-komunitas yang terkena akibat konflik. Tujuan lanjut SSPDA adalah mensosialisasikan Memorandum Kesepahaman 2005, untuk menjamin agar komunitas-komunitas di seluruh provinsi itu memahami kondisi-kondisi bagi perdamaian dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan.

SSPDA memberikan masukan kebijakan, mendukung berbagai aktifitas pemantauan konflik, penilaian tentang dampak-dampak dan kebutuhan-kebutuhan dengan tujuan mengarusutamakan perencanaan yang peka konflik dalam proses pemulihan. Sementara kondisi keamanan di provinsi tersebut dipastikan telah mendukung upaya-pemulihan, banyak yang masih harus dilakukan untuk menjamin distribusi bantuan yang merata untuk komunitas-komunitas yang menjadi korban konflik Aceh dan tsunami untuk mencegah terjadinya ketegangan-ketegangan sosial di masa datang atau munculnya kembali konflik.

Dengan dukungan Komisi Eropa (EC) SSPDA membantu BRA mengembangkan sebuah program reintegrasi pembangunan

perdamaian dan peka konflik yang efektif. Sarana yang paling efektif untuk mensosialisasikan proses perdamaian Aceh mencakup berbagai kegiatan sosial dan kultural masyarakat seperti pertunjukan teater dan pembangunan pusat kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat yang terekspos tersebut telah menjadi sarana yang sukses dalam meningkatkan interaksi antar-desa dan dengan sendirinya mengurangi ketegangan-ketegangan masyarakat.

SSPDA juga telah membantu BRA dengan manajemen program reintegrasi dan melaksanakan verifikasi data penerima manfaat serta mendukung pengembangan kapasitas di kantor BRA di berbagai kabupaten dengan memberikan perlengkapan, pelatihan pembangunan perdamaian dan pelatihan bagi para pelatih gugus tugas perumahan. Dengan komitmen EC untuk meningkatkan kapasitas manajemen data dalam mendukung perbaikan perencanaan dan pemberian bantuan reintegrasi kepada bekas kombatan dan korban konflik, SSPDA merekrut seorang Asisten Teknis Sistem Informasi Manajemen (MIS TA) untuk membantu BRA dalam meningkatkan sistem informasi, pengelolaan basis data dan penggunaan internet. Dengan begitu, BRA diharapkan dapat melakukan pemetaan, identifikasi dan verifikasi para penerima manfaat di NAD dengan lebih baik.

Proyek MGKD

Proyek "Dukungan bagi Komunitas Mantan GAM yang Kembali di NAD" SSPDA menawarkan masyarakat untuk memilih sebuah proyek pedesaan, yang dikenal sebagai buah hasil perdamaian, untuk mempermudah reintegrasi para bekas kombatan Aceh ke dalam komunitas masing-masing dan membangun kembali keakraban desa. Didanai oleh Biro Pencegahan dan Pemulihan Krisis (Bureau for Crisis Prevention and Recovery-BCPR) UNDP, proyek ini di kalangan setempat dikenal dengan nama Makmue Gampong Kareuna Damai (MGKD),



Meningkatnya interaksi antara komunitas dan bekas kombatan kerap dikaitkan dengan meningkatnya kepercayaan antar warga dalam kegiatan sosial.

atau 'Kesejahteraan Desa Berkat Perdamaian', yang difokuskan pada stabilitas perdamaian di tingkat akar rumput. MGKD melibatkan semua wakil-wakil masyarakat, termasuk para bekas kombatan, untuk ambil bagian dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi melalui proses yang transparan dan inklusif.

Setelah penandatanganan Nota Kesepakatan Helsinki 15 Agustus 2005, para bekas kombatan GAM dan tahanan-tahanan yang diberikan amnesti mulai kembali ke desa dan keluarga masing-masing setelah terpisah selama bertahun-tahun. Rasa tidak percaya antar penduduk desa bagaimanapun tidak serta merta berkurang dengan penandatanganan kesepakatan damai tersebut dan para bekas kombatan yang kembali seringkali merasa ditolak bergabung dengan masyarakat masing-masing. Menyadari bahwa upaya-upaya merundingkan perdamaian abadi di Aceh telah berulang kali gagal, banyak warga desa khawatir hubungan mereka dengan para bekas kombatan akan membahayakan posisi mereka jika proses perdamaian gagal lagi.

Diimplementasikan di 95 desa, 4 kabupaten, 11 kecamatan, proyek MGKD merupakan bantuan internasional pertama yang mencapai banyak desa di Aceh. Oleh karena itu, MGKD menyatukan warga desa



Tenda komunitas di Ladang Baro, Aceh Selatan.

“Kami benar-benar berpikir bahwa proses pemilihan ini menarik. Senang bisa memilih sesuatu; seperti menyuarakan pendapat secara bebas dan setiap orang harus mendengarkannya.”

Basir

Basir, warga desa Seunebok Pidie di Aceh Tamiang mengomentari proses pemilihan kegiatan desa.

secara kolektif untuk fokus kepada proyek-proyek kemasyarakatan, dan dengan demikian, saling interaksi dan bekerja untuk tujuan yang sama. Proses MGKD tersebut telah mendanai sebuah proyek di tiap desa berdasarkan keputusan yang diambil oleh pertemuan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, khususnya, para bekas kombatan pria. Desa-desa yang ikut serta juga memilih tiga fasilitator desa yang mendorong semua pihak untuk ambil bagian secara aktif dalam proses ini sehingga memperlambat rasa saling percaya antara warga desa.

Proyek MGKD dilaksanakan menurut mekanisme yang telah dirintis oleh Program Pembangunan Kecamatan yang didanai Bank Dunia di sebagian besar desa di Aceh, dimana warga diberdayakan untuk memilih proyek komunitas yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan pengecualian untuk tujuan keagamaan atau kegiatan dengan potensi dampak lingkungan yang negatif. Pada gilirannya, desa-desa memilih untuk mengimplementasikan berbagai ragam proyek seperti pengadaan barang-barang pertanian dan mesin pembangkit listrik, penyewaan perlengkapan pernikahan dan pesta, penyediaan lapangan olah raga atau pembelian ternak untuk digemukkan dan dijual kembali atau

pembibitan, perlengkapan olah raga atau proyek-proyek sejenis lainnya.

Seluruh desa sasaran MGKD pernah mengalami konflik berskala tinggi di masa lalu. Oleh karena itu, penting mengevaluasi bagaimana proses perdamaian Aceh dipahami oleh orang-orang desa sebelum dan sesudah keterlibatan UNDP. Dibandingkan dengan kondisi awal saat proyek dimulai, seluruh warga desa mengaku bahwa rasa aman mereka meningkat tajam. Saat proyek MGKD dimulai, hanya 20 dari 196 orang mengaku bahwa tingkat rasa aman mereka 'amat tinggi'. Namun, pada saat proyek itu berakhir bulan September 2007, ternyata 77 responden mengaku bahwa tingkat rasa aman mereka 'sangat tinggi' dan 55 lainnya mengaku 'tinggi' dari total 196 orang yang diminta pendapatnya. Survei itu juga mencatat peningkatan tajam rasa percaya diantara warga desa, dimana antara 30 sampai 60 desa sebelumnya memiliki tingkat rasa percaya yang rendah atau amat rendah sebelum MGKD dimulai. Tetapi, terbukti hanya kurang dari 10 desa yang termasuk dalam kategori memiliki tingkat rasa percaya yang rendah atau amat rendah. Banyak bekas kombatan mengungkapkan rasa terima kasih kepada proses MGKD, yang menilainya sebagai sebuah kesempatan untuk mendapatkan kembali pekerjaan mereka sebelumnya

melalui cara bergabung dengan warga desa lain sehingga menanggulangi rasa takut dan curiga mereka. Hal yang sama juga terjadi pada saat MGKD membantu warga desa yang bukan kombatan untuk memahami bahwa berkerja sama dengan para bekas kombatan bisa mengatasi ketakutan mereka dihubungkan dengan para bekas faksi-faksi bersenjata di Aceh.

Semangat masyarakat dan interaksi sosial juga terbukti meningkat setelah MGKD dimulai. Ketika ditanyai setahun yang lalu, mayoritas responden merasa semangat masyarakat 'rendah' atau 'amat rendah'. Namun, setahun kemudian, mayoritas kini merasa semangat masyarakat 'tinggi' atau 'amat tinggi' dan interaksi sosial meningkat dalam kategori 'rendah-lumayan' menjadi 'tinggi-amat tinggi'.

Proyek MGKD menekankan bahwa perempuan dianggap sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi proyek. Oleh sebab itu, semua pertemuan masyarakat MGKD bertujuan menyumbang pada pemberdayaan perempuan melalui cara mendorong mereka meninggalkan lingkungan domestik dan secara bebas berkomunikasi dengan yang lain, membentuk opini dan memainkan peranan aktif dalam masyarakat.

“Bagi warga desa biasa, bekerja bersama para bekas kombatan dapat menanggulangi rasa takut diasosiasikan dengan kelompok-kelompok bersenjata. Orang-orang Desa Dalam, Aceh Selatan, sempat khawatir ketahuan berbicara dengan para bekas kombatan GAM, karena takut akibatnya. Karena seluruh warga desa telah memutuskan untuk menyertakan para bekas kombatan dalam pertemuan-pertemuan desa dan gotong-royong, setiap orang merasa nyaman satu sama lain. Saya akhirnya merasa betah karena menurut saya warga lebih bersatu sekarang.”

Rafli Hidayat

Bekas kombatan Desa Dalam, Samadua di Aceh Selatan yang terlibat dalam komite desa komunitas.



Keberlanjutan Kepercayaan yang Tumbuh Berkat Pendekatan MGKD

Aspek terpenting dari proyek MGKD adalah antusiasme para warga desa dalam memastikan keberlanjutan proyek mereka. Para warga desa secara bersama menentukan syarat dan kondisi aset desa mereka. MGKD mendanai berbagai usaha komunitas yang meliputi, peternakan, listrik, irigasi serta penyewaan perlengkapan pernikahan. Sejumlah desa bahkan lebih dari sekedar mempertahankan proyek mereka dan menggunakan pendapatan dari penyewaan atau iuran untuk mendanai proyek baru atas prakarsa mereka sendiri. Sebagai contoh di Lhok Mon Puteh, Aceh Utara, masyarakat telah memulai proyek mereka berikutnya untuk membangun taman kanak-kanak tanpa bantuan dari luar. Menggunakan bahan bangunan yang disumbangkan, para pria setempat membangun sekolah tersebut dan para perempuan akan bergantian mengajar anak-anak berdasarkan sistem rotasi dalam MGKD. “Kami merasa lebih bersatu dibandingkan satu tahu yang lalu,” jelas Nira, salah seorang perempuan yang terlibat dalam proyek tersebut. “Kami sekarang mempunyai perlengkapan pernikahan sendiri dan kami berhasil membangun sebuah taman kanak-kanak untuk anak-anak di desa kami. Saya percaya desa kami akan lebih damai di masa yang akan datang karena anak-anak kami tidak tumbuh dengan rasa tidak percaya terhadap tetangganya. Kami lelah mengalami konflik dan kami menginginkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kami,” ujarnya.

DUKUNGAN UNDP

terhadap Mata Pencaharian Menjawab Tantangan Pembangunan Pasca Konflik

Selama konflik, dataran tinggi Aceh menderita kerugian baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomis. Banyak desa dataran tinggi terperangkap di tengah peperangan antara POLRI dan TNI di satu pihak melawan GAM di pihak lain, mengakibatkan pengungsian. Rasa curiga dan takut sudah umum dijumpai di dataran tinggi Aceh. Cerita Armada, 45 tahun, dari Timang Gaja, Kabupaten Bener Meriah sudah biasa dialami oleh penduduk setempat di wilayah yang banyak memproduksi kopi ini. Sejak tahun 2000, kondisi tidak aman menyulitkan dia untuk menanam dan memanen kebun kopinya. Trauma akibat kebakaran di rumahnya, ia mengungsi bersama istri dan lima anaknya ke kota Takengon di awal tahun 2003 selama 18 bulan. Berhubung ia perlu kembali secara teratur ke bukit untuk merawat dan memanen kebun kopinya, Armada jauh lebih beruntung dibandingkan petani kopi lainnya yang terpaksa mengungsi jauh sampai ke pantai. Berhubung terlalu lama meninggalkan kebun kopinya, para petani tersebut tidak dapat merawat kebunnya yang ditumbuhi

ilalang liar dan akhirnya sama sekali berhenti menghasilkan kopi.

Meskipun banyak inisiatif yang ditawarkan, semua petani yang kembali menghadapi tugas yang sukar dan menguras tenaga karena harus membersihkan ilalang liar dari kebun masing-masing. Survei-survei lapangan membuktikan bahwa mereka terpaksa bekerja untuk menghidupi keluarga masing-masing, sehingga kurang mempunyai waktu untuk merawat kebun masing-masing. Oleh sebab itu, banyak keluarga yang memutuskan bahwa hanya kaum pria yang kembali ke rumah masing-masing jika kebun mereka tidak menghasilkan panen karena terlalu sukar mendanai seluruh anggota keluarga. Abdullah, seorang petani kopi pengalaman yang berusia 52 tahun dari desa Pantan Kemuning di Bener Meriah, yang rumahnya habis terbakar waktu konflik, mengungsi ke Pidie dengan keluarganya agar selamat. Berkat pengalaman itu, Abdullah memberikan nasihat kepada para petani kopi di Aceh: "Anda harus memulihkan 50 persen kebun

Anda sebelum membawa pulang keluarga Anda," ujarnya.

Bahkan di desa-desa dimana produksi kopi telah pulih, berbagai kendala baru muncul. Berhubung tidak mampu mengolah hasil panennya, para petani menjual kopi mereka kepada tengkulak dan kehilangan keuntungan. Di sebagian daerah, ketiadaan pupuk organik menimbulkan kendala bagi para petani yang ingin menanam kopi organik "alami" yang mempunyai nilai jual lebih tinggi

“Sebelum Nota Kesepahaman Helsinki, apabila kami ingin mengadakan sebuah kegiatan sosial, kami hanya diam-diam menyampaikan informasi ke beberapa orang. Sekarang kami mengumumkannya keras-keras dengan menggunakan pengeras suara, seperti halnya dengan pertemuan-pertemuan desa kami.”

Tengku Ismail
villager of Seunebok Pidie,
Manyak Payed, Aceh Tamiang.

Membangun Kembali Komunitas

Bekerja sama dengan Organisasi Migrasi Internasional (International Organization of Migration-IOM), Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agricultural Organization-FAO) dan proyek Kemitraan Aceh untuk Pembangunan Ekonomi (Aceh Partnership for Economic Development-APED), SSPDA mendukung lebih dari 8,000 keluarga di Aceh Tengah dan Bener Meriah membangun kembali mata pencaharian mereka melalui penyediaan perlengkapan pertanian, pelatihan kejuruan khusus dan/ atau bantuan usaha melalui kelompok swadaya dan pengembangan koperasi. SSPDA memberikan hasil nyata perdamaian pasca Nota Kesepahaman Helsinki kepada komunitas mantan GAM yang kembali di NAD melalui penyediaan bantuan cepat kepada proyek komunitas skala kecil dan dukungan mata pencaharian di 95 desa di 11 kecamatan di 4 kabupaten (Aceh Utara, Aceh

Timur, Aceh Tamiang, Aceh Selatan). Total 8,688 orang dari empat kabupaten berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan desa, 46,4% di antaranya perempuan, termasuk 474 wakil mantan tahanan politik dan kombatan. SSPDA telah memperkuat kemampuan perempuan berkolaborasi dengan empat LSM utama yang berbasis di Aceh sebagai rekanan (PKPM, MISPI, PATIMADORA dan PASKA Pidie). Serangkaian pelatihan dan lokakarya tentang isu-isu kritis seperti pengarusutamaan jender, dan penyusunan anggaran, penyusunan peraturan, pembangunan perdamaian, sosio-ekonomi, budaya lokal dan HAM telah diselenggarakan dan melibatkan 80 organisasi perempuan Aceh di NAD dengan lebih dari 400 peserta perempuan, termasuk para bekas kombatan perempuan Inong Balee (organisasi bekas kombatan perempuan Aceh) dari seluruh Aceh.



di pasar ekspor. Dengan penyediaan mesin pengupas kopi, penggiling untuk membuat pupuk organik dan alat yang sederhana untuk mengolah hasil panen, masyarakat dapat mengurangi kendala produksi dan menambah nilai hasil panennya dan memungkinkan rumah tangga tersebut memulai kembali atau memperbaiki mata pencaharian dalam waktu singkat.

Penyediaan perlengkapan utama pertanian oleh UNDP secara khusus ditujukan membantu para petani yang kembali dan korban konflik yang lain. Maka, selain pacul, sekop dan peralatan lainnya, UNDP juga menyediakan mesin pemotong rumput dan mesin pengupas ke sejumlah desa dengan petani yang kembali dalam jumlah besar. Disesuaikan dengan kebutuhan desa-desa tertentu, dengan memanfaatkan proyek mata pencaharian di dataran tinggi oleh IOM dan FAO, serta mengaitkannya dengan program Kemitraan Aceh untuk Pembangunan Ekonomi (Aceh Partnership for Economic Development-APED) untuk pengembangan perkebunan, SSPDA telah berhasil menjangkau lebih dari 7,000 penerima manfaat.

Dalam tahun-tahun setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki 15 Agustus 2005, semakin banyak keluarga yang kembali ke desa masing-masing di dataran tinggi untuk mencoba memulai mata pencaharian mereka. Didukung oleh Fasilitas Dukungan Desentralisasi (Decentralization Support Facility-DSF) "Prakarsa Reintegrasi Pengungsi yang Aman dan Berkelanjutan Melalui Dukungan Mata Pencaharian dan Kehidupan Bersama" juga menyediakan perumahan yang sangat dibutuhkan para pengungsi yang kembali dan pada saat yang sama menyediakan kebutuhan pemulihan mata pencaharian setelah akibat negatif konflik sebelumnya.

Ketentuan lain yang didefinisikan dalam Nota Kesepahaman Helsinki meliputi bantuan bagi reintegrasi bekas kombatan, tahanan yang dibebaskan dan kategori penerima manfaat lainnya. Namun, meskipun perempuan berperan penting dalam memasok dan mendukung para pejuang, dan dalam kasus tertentu memanggul senjata, dari segi proporsi mereka menerima bantuan ekonomi yang jauh lebih sedikit. Di sisi lain, banyak

keluarga orang tua tunggal di Aceh dikepalai perempuan yang kembali setelah konflik berhenti dan kelompok ini sering mengalami kesulitan yang paling berat di antara kelompok orang yang kembali. Meskipun ada kebutuhan khusus, dana yang disediakan untuk bekas kombatan, korban konflik, dan penerima manfaat lainnya melalui BRA telah dibelanjakan seluruhnya, menyebabkan mustahil membiayai reintegrasi para perempuan tersebut.

Kesepakatan Perdamaian Helsinki menetapkan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyediakan dana dan/atau lahan pertanian bagi bekas kombatan, tahanan politik dan orang sipil yang telah mengalami kerugian besar akibat konflik. Sementara sumber bantuan reintegrasi yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia melalui APBN bagi para penerima manfaat yang diidentifikasi BRA, akan berakhir tahun 2008. Oleh karena itu, komponen mata pencaharian SSPDA, yang didanai melalui Program Dukungan Proses Perdamaian Aceh (Aceh Peace Process Support Programme) dari Komisi Eropa (EC), akan menargetkan kebutuhan para bekas kombatan perempuan di Aceh.

Dukungan EC untuk Bekas-Kombatan Perempuan



UNDP akan menanggapi kebutuhan 2,021 bekas kombatan perempuan dengan memberikan bantuan mata pencaharian berjangka menengah, pelatihan dan dukungan pemasaran awal Juli 2008 untuk periode satu tahun. Program mata pencaharian ini dirancang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan pembangunan perdamaian yang pada prinsipnya bertujuan meningkatkan integrasi sosial bekas kombatan perempuan dan kelompok rentan lainnya di daerah-daerah yang di target secara spesifik.

Diskusi dengan bekas-kombatan perempuan mengungkap kesulitan yang mereka hadapi. Perempuan umumnya harus melakukan pekerjaan rumah, mengumpulkan kayu bakar di hutan dan bahkan melakukan kerja kasar yang pada umumnya dilakukan pria. Seperti dikatakan seorang bekas-kombatan di Bireun: "Kelompok bekas-kombatan perempuan harus bekerja

seperti kerbau hanya untuk mendapatkan Rp. 25,000 per hari yang mereka butuhkan untuk kelangsungan hidup mereka." Kelompok-kelompok bekas kombatan perempuan telah berhasil memulai usaha dan koperasi, meskipun keuntungan dan keberlanjutan berbagai usaha tersebut tetap rapuh akibat kurangnya modal dan akses terhadap kredit investasi. Sebagian bekas kombatan bergabung menjadi tentara pada waktu mereka masih muda dan harus menginterupsi studi mereka sebelum mendapat ketrampilan yang cukup.

Para perempuan Liga Inong Aceh (LINA) di Pidie tersebut bertekad untuk berhasil: "Perempuan Pidie tidak ingin hanya duduk-duduk saja. Tekad mereka keras, Anda harus tahu. Mereka akan melakukan segalanya; mereka akan bekerja keras sepanjang hari tanpa henti untuk mendapatkan uang. Kami semua paham mengenai isu jender. Perempuan Pidie tidak pernah bermalas-malasan. Di desa-desa, perempuanlah yang mengendalikan keuangan." Jelas dari pembicaraan dengan perempuan yang penuh tekad ini, bahwa mereka lebih memilih mendapatkan dukungan daripada sedekah untuk memulihkan mata pencaharian mereka demi memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarganya.

PROFIL PENERIMA MANFAAT

Kegiatan Pembangunan Perdamaian

Lokasi	Proyek	Kegiatan	Penerima Manfaat
Peace Through Development (Pembangunan Melalui Perdamaian)			
Kabupaten yang dipilih di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.	Perencanaan peka konflik dan dialog kebijakan.	Proses perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up) di desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi. Pelatihan perencanaan peka konflik, tata laksana pemerintahan yang baik dan Musrenbang bagi pembuat kebijakan. Pelatihan peka konflik bagi OMS dan para anggota masyarakat.	Pejabat pemerintah daerah. DPRD. Masyarakat madani. Masyarakat di kabupaten yang diseleksi di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.
24 desa target di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.	Perencanaan partisipatif peka konflik tingkat desa.	Pelatihan penulisan proposal dan penganggaran proyek.	305 dewan penasehat desa dan 3,264 warga desa.
Kabupaten yang dipilih di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.	Pengenalan peraturan Musrenbang, informasi dan kebijakan publik.	1. Acara bincang-bincang radio dan televisi reguler mengenai kepekaan konflik. 2. Sosialisasi hasil Musrenbang di desa dan kecamatan target PTD.	Penduduk di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.
Kabupaten yang dipilih di Maluku dan Sulawesi Tengah.	Perumusan peraturan dan prosedur yang baru tentang Musrenbang di daerah.	1. Perumusan Surat Keputusan Walikota untuk pedoman teknis Musrenbang 2007. 2. Penyusunan Pedoman Teknis dalam PERDA Kabupaten Maluku Tengah.	Penduduk Kota Palu dan Kabupaten Maluku Tengah.
Propinsi Maluku Utara.	Mekanisme pendukung pengendalian publik atas pemanfaatan sumber daya lokal.	1. Bantuan Teknis untuk Forum Peduli Pembangunan. 2. Lokakarya tentang penyiapan unit pengaduan BAPPEDA.	Penduduk Propinsi Maluku Utara.
Kabupaten yang dipilih di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.	Implementasi prinsip-prinsip pluralisme, saling-menghormati dan kepentingan bersama.	1. Pemberian hibah. 2. Program Respon Cepat untuk konflik Nunu and Tavanjuka di Kota Madya Palu.	Masyarakat di kabupaten yang diseleksi di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.
Kabupaten yang dipilih di Maluku Utara.	Dukungan terhadap pengarusutamaan jender.	1. Lokakarya penyusunan PERDA tentang konvensi penghapusan kekerasan rumah tangga. 2. Lokakarya pendirian organisasi-organisasi perempuan.	Masyarakat madani di kabupaten sasaran di Propinsi Maluku Utara.
Maluku dan Propinsi Maluku Utara.	Penelitian Jender.	1. Studi tentang Perempuan dalam Pembangunan Perdamaian di Maluku. 2. Penelitian tentang kegiatan yang berkaitan dengan jender.	Staf proyek lokal.
Kabupaten sasaran di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.	Promosi pembangunan perdamaian melalui media.	1. Pertemuan-pertemuan media dan acara bincang-bincang radio dan televisi interaktif. 2. Publikasi yang berkaitan dengan perdamaian (termasuk Buletin Tiga Bulanan Maluku Utara dan Halmahera Barat). 3. Festival perdamaian.	Warga di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Jurnalis yang diseleksi dan mengambil bagian.
Kota Ambon.	Daur Ulang dan Pengelolaan Sampah.	1. Bantuan Teknis ke Kota Madya Ambon. 2. Kunjungan ke Pontianak, Surabaya and Makassar. 3. Penilaian teknis pengelolaan sampah yang ada oleh Tim Pengelolaan Sampah Aceh.	Warga Ambon.
Propinsi Maluku.	Keterlibatan lintas komunitas yang meningkat melalui kerja sama UNIDO/PTD.	1. Penanaman ulang bibit sagu dan bambu. 2. Pendirian kelompok pengembangan usaha di komunitas-komunitas.	
Kabupaten sasaran di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.	Akses yang lebih baik atas pelayanan-pelayanan keuangan dan pengembangan usaha.	Lokakarya-lokakarya pengembangan kapasitas.	
Tingkat Nasional.	RUU Penanggulangan Konflik.		
Penguatan Perdamaian dan Pembangunan yang Berkelanjutan di Aceh			
Banda Aceh.	Penguatan Kapasitas Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk mengimplementasikan Kesepakatan Damai Helsinki.		Pemerintah Aceh dan Nasional.
Banda Aceh.	Penguatan kapasitas pemerintah.	Pembangunan kapasitas pemerintah.	Pemerintah Propinsi Aceh.
95 desa di 4 kabupaten di Aceh.	Dukungan terhadap mantan GAM yang kembali ke masyarakat di Aceh di dalam kerangka kerja Kesepakatan Perdamaian.	Pengidentifikasi desa yang mengalami konflik yang menerima bekas kombatan; pengidentifikasi dan penyediaan proyek komunitas berskala kecil dan dukungan mata pencaharian yang melibatkan para bekas kombatan.	94.410 penerima manfaat di 95 desa yang mengalami konflik di Aceh yang menerima bekas kombatan dan tahanan telah menerima "dividen perdamaian" berupa hibah.
Aceh Tengah dan Bener Meriah.	Prakarsa Reintegrasi Pengungsi yang Aman dan Berkelanjutan Melalui Dukungan Mata Pencaharian dan Eksistensi Bersama di Aceh Tengah dan Bener Meriah di dalam kerangka kerja implementasi kesepakatan perdamaian di Aceh.	1. Pengidentifikasi keluarga yang mengalami konflik di Aceh Tengah and Bener Meriah. 2. Pemberian bantuan penciptaan pendapatan langsung melalui pemberian bantuan pertanian langsung. 3. Memberdayakan masyarakat madani lokal. Pelatihan dan lokakarya untuk mitra LSM lokal dalam dukungan usaha pertanian bagi komunitas yang mengalami konflik di dua kabupaten.	Lebih dari 1,500 rumah tangga pengungsi yang terdiri dari 4,500 korban konflik di dua kabupaten termasuk perempuan dan kelompok-kelompok rentan, bekas kombatan, koperasi, 223 kelompok-kelompok swadaya yang terdiri dari 3,316 perempuan dan 3,335 laki-laki.
Sebagian besar kabupaten di NAD.	Penguatan Kapasitas Perempuan untuk menjadi mitra yang efektif dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh.	Pengembangan kapasitas melalui 13 kursus pelatihan dan lokakarya.	Peserta yang sebagian besar perempuan dan aktivis dari berbagai organisasi di Aceh.
Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.	Penilaian pengungsi di Aceh dan Sumatera Utara.	Pengidentifikasi dan verifikasi komunitas pengungsi yang mengalami konflik. Penilaian komunitas pengungsi yang sekarang dan yang baru kembali dan penilaian tentang komunitas penerima.	Pengungsi di Aceh dan Sumatera Utara.
Kabupaten-kabupaten di Aceh Barat, Aceh Utara dan Aceh Besar.	Sosialisasi program reintegrasi dan kampanye perdamaian.	Diseminasi materi kampanye perdamaian seperti poster, kalender, stiker, buku, T-shirt dan spanduk.	Komunitas Aceh di daerah yang mengalami konflik.

TENTANG UNDP Indonesia

UNDP adalah jaringan pembangunan global PBB, mengadvokasikan perubahan dan menghubungkan berbagai negara dengan pengetahuan, pengalaman dan sumber daya untuk membantu masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kami ada di 166 negara, menunjang solusi negara terhadap tantangan pembangunan global dan nasional.

Para pemimpin dunia telah berikrar untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goal-MDG), termasuk tujuan secara keseluruhan untuk mengurangi kemiskinan sebanyak 50% pada tahun 2015. Jejaring UNDP menghubungkan dan mengkoordinasikan upaya global dan nasional untuk mencapai tujuan tersebut. Fokus kami adalah membantu negara membangun dan berbagi solusi tantangan terhadap:

- Tata Laksana Pemerintahan yang

Demokratis

- Pengurangan Kemiskinan
- Pencegahan dan Pemulihan Krisis
- Energi dan Lingkungan
- HIV/AIDS

UNDP membantu negara berkembang untuk mendapatkan dan menggunakan bantuan secara efektif. Dalam semua kegiatan, kami senantiasa mendorong perlindungan HAM dan pemberdayaan perempuan.

UNDP Indonesia adalah mitra bangsa Indonesia, berbagi pengetahuan, pengalaman dan sumber daya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Sebagai sebuah agen perubahan yang dipercaya dan berorientasi pada pelayanan, UNDP Indonesia menyediakan keahlian profesional dalam empat bidang program utama yaitu Tata Laksana Pemerintahan yang Demokratis, Advokasi dan Pemantauan

Tujuan Pembangunan Milenium, Pencegahan dan Pemulihan Krisis serta Pelestarian Lingkungan Hidup.

Dalam bidang fokus ini, UNDP Indonesia bekerja sama dengan erat dengan pemerintah Indonesia dalam merumuskan solusi yang realistis dan layak terhadap tantangan reformasi dan pembangunan, dengan memanfaatkan jejaring globalnya dan keberadaannya di Indonesia.

UNDP Indonesia bertujuan untuk memberikan respon yang menyeluruh dan terintegrasi terhadap berbagai tantangan Indonesia saat ini melalui program dan kegiatan yang menarget berbagai tingkatan masyarakat, dan pada saat yang sama membantu mengkomunikasikan agenda nasional kepada para donor dan pemangku kepentingan untuk memberikan bantuan di masa yang akan datang.

UNIT PENCEGAHAN DAN PEMULIHAN KRISIS (Crisis Prevention and Recovery Unit-CPRU) UNDP Indonesia

Di Indonesia, UNDP telah mendirikan enam kantor lapangan untuk mendukung berbagai operasi Pencegahan dan Pemulihan Krisisnya di Aceh, Nias, Yogyakarta, Ambon, Palu dan daerah-daerah di Ternate. Kantor Banda Aceh dan Nias adalah pusat regional untuk berbagai kegiatan Respon Darurat dan Pemulihan Peralihan (Emergency Response and Transitional Recovery-ERTR) Aceh. Kantor Yogyakarta menangani Bantuan Pemulihan Dini (Early Recovery Assistance-ERA) sedangkan kantor di Ambon dan Ternate menangani kegiatan Pembangunan Melalui Perdamaian (Peace Through Development-PTD). Selain itu, ada 45 staf di kantor perwakilan UNDP di Jakarta yang mendukung empat seksi yang terintegrasi yang berkaitan dengan cakupan kerja CPRU.

Kegiatan Penanggulangan Bencana UNDP yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana alam dan pemulihan pasca bencana dan terdiri dari program ERTR untuk Aceh dan Nias, proyek ERA di Yogyakarta, program dukungan terhadap organisasi masyarakat sipil (CSO) dan Prakarsa Komunitas yang Lebih Aman

melalui Pengurangan Risiko Bencana (Safer Communities through Disaster Risk Reduction SC-DRR).

Kegiatan UNDP yang berkaitan dengan pencegahan konflik, kohesi sosial, rekonsiliasi masyarakat/komunitas dan pembangunan perdamaian adalah program Penguatan Perdamaian dan Pembangunan yang Berkelanjutan (SSPDA) di Aceh serta Program Pembangunan Melalui Perdamaian (PTD) yang diimplementasikan di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.

Dengan fokus pada manajemen pembelajaran yang diperoleh, Tim CPR UNDP juga secara spesifik menghubungkan pelaku utama pembangunan dengan informasi, pengalaman dan keahlian yang relevan melalui pembuatan jejaring, pengalihan pengetahuan dan kegiatan lain yang terkait. Kegiatan kami memastikan bahwa keluaran proyek dilembagakan, disosialisasikan dan tersedia di seluruh kantor perwakilan UNDP serta bagi para pemangku kepentingan pembangunan lain khususnya pemerintah dan berbagai mitra

pembangunan UNDP lainnya. Sebagai cara yang proaktif untuk menyebar pengetahuan, tim tersebut juga melakukan studi dan lokakarya reguler untuk membangun kapasitas daerah dan memfasilitasi proses pembelajaran untuk kepentingan semua pihak yang bergiat dalam sektor pembangunan.

Tim CPR kami juga terdiri dari sebuah seksi khusus yang mendukung semua program CPRU dari awal sampai akhir. Tim kami memastikan bahwa kegiatan CPRU memberikan bantuan sesuai dengan perangkat dan metodologi program UNDP dan memenuhi semua kewajiban terhadap para donor, rekanan pelaksana dan pemerintah. Tim kami mendukung kegiatan CPR dengan membentuk data dasar dan keluaran proyek, mengawasi pemantauan dan evaluasi tonggak-tonggak keberhasilan dan target proyek serta memastikan kepatuhan persyaratan pelaporan, audit, komunikasi, keuangan dan pengarusutamaan jender dan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam semua kegiatan Pemulihan dan Pencegahan Krisis.